LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR :
000.72/30.15.302/WK-PYK/2024
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DPRD KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2024

WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 000.72/30.15.302/WK-PYK/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah harus mampu menyesuaikan terhadap perkembangan kondisi daerah yang berlangsung dengan tetap berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran daerah;

b bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024, maka Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 367 Ayat (2) menyatakan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 62);

8. Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;

9. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

KEDUA : Menetapkan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang merupakan Perubahan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran Perubahan RKPD Tahun 2024.

KETIGA : Perangkat Daerah yang menyusun Perubahan Renja sebagaimana dimaksud pada dictum kedua sebagai berikut:

a. dinas pendidikan
b. dinas kesehatan;
c. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
e. satuan polisi pamong praja dan pemadan kebakaran;
f. badan penanggulangan bencana daerah;
g. dinas sosial;
h. dinas tenaga kerja dan perindustrian;
i. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
j. dinas ketahanan pangan;
k. dinas lingkungan hidup;
l. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
m. dinas perhubungan;
n. dinas komunikasi dan informatika;
o. dinas koperasi, usaha kecil dan menengah;
p. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
q. dinas pariwisata, pemuda dan olah raga;
r. dinas perpustakaan dan kearsipan;
s. dinas pertanian;
t. sekretariat daerah;
u. sekretariat dprd;
v. badan perencanaan pembangunan daerah;
w. badan keuangan daerah;
x. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
y. inspektorat;
z. kecamatan payakumbuh utara;
aa. kecamatan payakumbuh barat;
bb. kecamatan payakumbuh timur;
cc. kecamatan payakumbuh selatan;
dd. kecamatan lamposi tigo nagori; dan
ee. kantor kesbangpol.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

a. pendahuluan;
b. evaluasi renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan;
c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan

d. penutup.

KELIMA : Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEENAM : Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 berpedoman pada :
a. Perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024;
b. Hasil pengendalian pelaksanaan renja Perangkat Daerah sampai triwulan ke II tahun berkenaan.

KETUJUH : Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja anggaran Perangkat daerah.

KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Agustus 2024

PLT. WALI KOTA PAYAKUMBUH,

SUPRAYITNO

Tembusan : disampaikan kepada Yth.
1. Perangkat Daerah Kota Payakumbuh.
2. Arsip.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR LAMPIRAN..... vii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang..... 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan..... 5
1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2024 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh..... 25
2.3. Isu-isu Penting PenyelenggaranTugas dan Fungsi PD 27

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD..... 28
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 28
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 29
3.3. Program dan Kegiatan 29
3.4. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD 31

BAB IV PENUTUP 50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sampai Dengan Bulan Juli Tahun 2024 Kota Payakumbuh.....18

Tabel 2.2 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh.....26

Tabel 3.1 Rencana Program Dan Kegiatan Pada Perubahan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2024 Sesuai Sumber Pendanaan 52

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Srategis (Renstra) dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 11, yaitu " Rencana pembangunan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode Satu tahun.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam pasal 273 ayat 2 disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan kedalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD". Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam pasal 273 ayat 3, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah".

Dalam menjalankan amanat tersebut, Sekretariat DPRD Kota Peyakumbuh sebagai Perangkat Daerah telah menyusun Renja Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2024 serta Renstra Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Namun sehubungan dengan dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2024 yang disebabkan oleh :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah perlunya penyesuaian target pendapatan dan pagu indikatif, serta penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan triwulan II tahun 2024 termasuk pada Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Paykumbuh Tahun 2023-2026.

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 pada Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh tahun 2023 ini berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan, dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
12. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
18. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 4);
20. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 21);

21. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 6);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukannya Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 pada Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh adalah:

1. Mengantisipasi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi pendanaan program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan di tahun berjalan.
2. Mengantisipasi perencanaan kegiatan yang tidak terakomodir pada Renja sebelumnya baik pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, pengurangan target kinerja, maupun perubahan terhadap lokasi dan kelompok sasaran.

Tujuan dilakukannya penyusunan perubahan Rencana Kerja pada Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh adalah:

1. Terevaluasinya pelaksanaan program dan kegiatan baik input, output dan outcome serta sasaran yang hendak dicapai dari setiap program dan kegiatan.
2. Menjadi acuan dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh terhadap perubahan Renja yang telah dilakukan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kerangka acuan kerja (KAK) dan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan RencanaKerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2023 disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistimatika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. MaksuddanTujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2024 Sampai Bulan Juni

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.2. Program dan Kegiatan

3.4. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD

BAB. IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2024

Alokasi Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh tahun 2024 adalah sebesar Rp.35.500.982.667,- yang terdiri dari 2 program, 14 kegiatan dan 40 Sub kegiatan. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai kondisi bulan Juni Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang meliputi penyediaan ATK, fotokopi, jilid, serta makan minum rapat. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.324.050,- dan sampai dengan Juni 2024 terealisasi sebesar Rp.2.827.000,- atau 22,94 %.

b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah yang meliputi penyediaan ATK (alat tulis kantor), fotokopi dan jilid serta makan minum rapat. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.460.350,- dan sampai dengan Juni 2024 terealisasi sebesar Rp.330.000,- atau 2 %. Rendahnya alokasi anggaran ini disebabkan rendahnya volume rapat-rapat yang yang dilaksanakan.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai/ASN Sekeretariat DPRD yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, iuran jaminan kesehatan, tambahan penghasilan ASN serta belanja

honorarium dan lembur ASN Sekeretariat DPRD. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.687.895.639,- dan sampai dengan Juni 2024 terealisasi sebesar Rp.962.415.112,- atau 35,81 %

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Belanja Lembur. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.222.112.000,- dan sampai dengan Juni 2024 terealisasi sebesar Rp.74.499.000,- atau 33,54 %

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor bertujuan untuk memenuhi kebutuhan komponen-komponen instalasi listrik/penerangan ruangan dan bangunan kantor agar terciptanya ruangan dan Gedung kantor yang lebih kondusif dan representative dalam penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD berupa lampu, kabel, fitting stiker, dan lain-lain. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.021.800,- dan sampai dengan Juni 2024 terealisasi sebesar Rp.10.280.000,- atau 48,90 %.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor sebagai sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.523.567.700,- dan sampai dengan Juni 2024 terealisasi sebesar Rp.12.210.000,- atau 2,33 %.

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik Kantor bertujuan untuk memenuhi kebutuhan logistk kantor sebagai sarana

pendukung pelaksanaan operasional kantor berupa ATK (alat tulis kantor) seperti amplop, hekter, stempel, box file dan semacamnya serta penyediaan Kertas HVS untuk kebutuhan kantor. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.131.215.350,- dan sampai dengan Juni 2024 terealisasi sebesar Rp.28.389.000,- atau 21,64 %.

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang cetak, penggandaan dan penjili dan guna mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi SKPD, berupa amplop dinas, lembar disposisi, kertas kop, kwitansi dinas, map kop dinas, belanja foto copy dan belanja jilid. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.644.750,- dan sampai dengan Juni 2024 terealisasi sebesar Rp.3.986.000,- atau 14,42 %.

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan bacaan baik berupa media cetak maupun peraturan perundang-undangan, sekaligus sebagai media informasi bagi Anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD dalam rangka meningkatkan sensitifitas Anggota Dewan serta pegawai terhadap perkembangan di segala bidang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sekaligus sebagai media dalam peningkatan pengetahuan pegawai. Berupa harian Padang Ekspres, harian Singgalang dan Harian Pos Metro Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.018.100,- dan sampai Juni 2024 belum terealisasi atau masih 0%. Rendahnya alokasi anggaran disebabkan belum datangnya tagihan dari pihak penyedia.

f. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan makan minum Sekretariat DPRD dan Rumah Dinas Ketua DPRD, yang mana meliputi kebutuhan

makan minum harian pimpinan, Sekretariat DPRD, tamu pimpinan dan tamu Sekretariat. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.382.007.350,- dan sampai dengan Juni 2024 terealisasi sebesar Rp.102.229.050,- atau 26,76 %.

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah, guna menghadiri rapat-rapat koordinasi atau pun untuk Sekretariat DPRD. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.629.343.000,- dan sampai dengan Juni 2024 terealisasis sebesar Rp.556.953.509,- atau 34,18 %.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah

a. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini masih berupa cantolan yaitu sebesar Rp. 5.753.800,-

b. Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Sub Kegiatan ini berupa pengadaan lemari arsip dan kursi kerja untuk ruang rapat paripurna. Dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 100.000,- dan sampai Juni 2024 belum terealisasi atau masih 0%.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan jasa telekomunikasi internet guna mendukung efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, penyediaan air bersih sebagai sarana pendukung kenyamanan penyelenggaraan tugas serta penyediaan listrik sebagai sarana penunjang penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.230.521.488,- dan sampai dengan Juni 2024 terealisasi sebesar Rp.80.895.306,- atau 35,09 %.

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kantor yang meliputi tersedianya alat kebersihan dan bahan-bahan pembersih seperti tempat sampah, pembersih lantai, pengharum ruangan, sapulidi, kain pel dan semacamnya serta penyediaan tenaga kebersihan (THL) berikut iuran jaminan kesehatannya. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.750.198.972,- dan sampai dengan Juni 2024 terealisasi sebesar Rp.228.010.188,- atau 30,39 %.

6. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

   a. **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

      Sub Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pimpinan DPRD, yaitu pemeliharaan mobil dinas Pimpinan DPRD berupa kendaraan roda empat sebanyak 3 unit. Kegiatan ini berupa penyediaan jasa servis, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak dan pelumas. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.217.600.000,- dan sampai dengan Juni 2024 terealisasi sebesar Rp.82.837.449,- atau 38,07 %.

   b. **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

      Sub Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, yaitu kendaraan roda empat sebanyak 9 unit dan roda dua sebanyak 12 unit dan bus 3 unit. Kegiatan ini berupa penyediaan jasa servis, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak dan pelumas kendaraan dinas/operasional kantor. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.402.340.000,- dan sampai dengan Juni 2024 terealisasi sebesar Rp.66.681.430,- atau 16,57 %.

   c. **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

      Sub Kegiatan ini berupa terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan kantor dalam rangka tersedianya peralatan

kantor penunjang operasional kegiatan kantor/administrasi yang siap dan layak pakai berupa service dan perbaikan Komputer, Laptop, printer serta aksesoris komputer Sekretariat DPRD dan. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.83.718.000,- dan sampai dengan Juni 2024 terealisasi sebesar Rp.21.241.000,- atau 25,37 %.

d. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Sub Kegiatan ini berupa terlaksananya pemeliharaan rutin sarana prasarana pendukung/perlengkapan Gedung kantor dalam rangka tersedianya peralatan gedung kantor yang siap dan layak pakai berupa service dan perbaikan AC, CCTV dan Genset di Sekretariat DPRD dan Rumah Dinas Ketua DPRD. Dilaksanakan dengan alokasi anggarans ebesar Rp.149.877.728,- dan sampai dengan Juni 2024 terealisasi sebesar Rp.17.209.314,- atau 11,48 %.

7. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

Sub Kegiatan Penyediaan Gajia dan Tunjangan ASN bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan Anggota DPRD yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, iuran jaminan kesehatan, serta tunjangan perumahan dan sebagainya. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.399.484.890,- dan sampai dengan Juni 2024 terealisasi sebesar Rp.3.010.112.558,- atau 32,23 %.

b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD sebagai salah satu upaya peningkatan kedisiplinan, terutama dalam kerapian dan keseragaman pegawai, berupa tersedianya pakaian sipilharian untuk 25 orang anggota DPRD. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.620.000.000,- dan sampai dengan Juni 2024 terealisasi sebesar Rp.182.440.000 atau 29,43 %

c. Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD

Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check-Up bertujua nuntuk memfasilitasi Anggota DPRD dalam hal pemeliharaan Kesehatan dalam upaya meningkatkan aktifitas kerja Anggota DPRD dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 31.250.000,- dan sampai Juni 2024 belum terealisasi atau masih 0%. Belum terealisasinya anggaran sub kegiatan ini disebabkan belum adanya Anggota DPRD yang melaksanakan medical check up.

8. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD

a. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Sub Kegiatan ini berupa belanja alat-alat, makan dan minum rapat, makan dan minum tamu, jasa tenaga keamanan, jasa penyelenggaraan acara, sewa mabel, sewa alat studio, dan lain-lain. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.355.670.500,- dengan realisasi kegiatan Rp.21.872.500,- atau 6,15 % s.d Juni 2024. Rendahnya realisasi anggaran pada sub kegiatan ini disebabkan anggaran terbesar yaitu untuk rapat paripurna istimewa, sedangkan rapat paripurna istimewa tersebut baru akan dilaksanakan pada Bulan Agustus dan Desember.

b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

Sub Kegiatan ini berupa belanja alat/bahan untuk kegiatan dan perabot kantor, belanja modal alat pembersih dan belanja modal alat rumah tangga lainya (home use). Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.457.800,- dan sampai Juni 2024 belum terealisasi atau masih 0%.

II. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Sub Kegiatan ini berupa penyediaan makan minum rapat, ATK, biaya perjalanan dinas. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.88.999.650,- dan sampai dengan Juni 2024 terealisasi sebesar Rp.6.187.250 atau 6,95 %. Rendahnya realisasi anggaran pada sub kegiatan ini disebabkan belum masuknya kegiatan rapat-rapat pembahasan Ranperda

kedalam jadwal Bamus sehingga makan minum rapat belum dapat direalisasikan.

2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran

a. Pembahasan KUA dan PPAS

Sub Kegiatan ini berupa rapat-rapat dalam rangka persiapan penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.720.850,- dan sampai dengan Juni 2024 belum terealisasi atau masih 0%. Belum terealisasinya anggaran pada sub kegiatan ini disebabkan belum adanya jadwal rapat-rapat pembahasan KUA-PPAS.

b. Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS

Sub Kegiatan ini berupa rapat-rapat pembahasan perubahan KUA dan PPAS dengan Pemerintah Daerah. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.689.950,-. dan sampai dengan Juni 2024 belum terealisasi masih 0%. Belum terealisasinya anggaran pada sub kegiatan ini disebabkan belum adanya jadwal rapat-rapat pembahasan Perubahan KUA-PPAS.

c. Pembahasan APBD

Sub Kegiatan ini berupa rapar-rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Pemerintah Daerah. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.183.825.100,- dan sampai dengan Juni 2024 belum terealisasi atau masih 0%. Belum terealisasinya anggaran pada sub kegiatan ini disebabkan belum adanya jadwal rapat-rapat pembahasan APBD.

d. Pembahasan APBD Perubahan

Sub Kegiatan ini berupa rapat-rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan dengan Pemerintah Daerah. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.152.658.350,- dan sampai dengan Juni 2024 belum terealisasi atau masih 0%. Belum terealisasinya anggaran pada

sub kegiatan ini disebabkan belum adanya jadwal rapat-rapat pembahasan APBD Perubahan.

e. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

Sub Kegiatan ini berupa rapat-rapat pembahasan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Pemerintah Daerah. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.37.342.450,- dan sampai dengan Juni 2024 terealisasi sebesar Rp.25.436.625,- atau 68,12 %.

3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum

Sub Kegiatan ini berupa rapat-rapat hearing dan turun lapangan dalam rangka pengawasan DPRD dalam urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukumu ntuk mewujutkan tata Kelola pemerintahan yang baik. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.38.964.700,- dan sampai Juni 2024 belum terealisasi atau masih 0%. Rendahnya alokasi anggaran disebabkan belum adanya jadwal kegiatan-kegiatan pengawasan.

b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Insfrastruktur

Sub Kegiatan ini berupa rapat-rapat hearing dan turun lapangan dalam rangka pengawasan DPRD dalam urusan pemerintahan bidang insfratruktur untuk mewujutkan tata Kelola pemerintahan yang baik. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.871.600,- dan sampai Juni 2024 belum terealisasi atau masih 0%. Rendahnya alokasi anggaran disebabkan belum adanya jadwal kegiatan-kegiatan pengawasan.

c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Sub Kegiatan ini berupa rapat-rapat hearing dan turun lapangan dalam rangka pengawasan DPRD dalam urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.36.218.100,- dan sampai Juni 2024 belum terealisasi atau masih 0%. Rendahnya alokasi

anggaran disebabkan belum adanya jadwal kegiatan-kegiatan pengawasan.

d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

Sub Kegiatan ini berupa rapat-rapat hearing dan turun lapangan dalam rangka pengawasan DPRD dalam urusan pemerintahan bidang perekonomian untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.31.666.150,- dan sampai Juni 2024 belum terealisasi atau masih 0%. Rendahnya alokasi anggaran disebabkan belum adanya jadwal kegiatan-kegiatan pengawasan.

4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD

a. PendalamanTugas DPRD (Bimtek)

Sub Kegiatan ini berupa pelaksanaan bimbingan teknis DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pimpinan dan anggota DPRD. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.616.595.750,- dan sampai Juni 2024 belum terealisasi atau masih 0%. Rendahnya alokasi anggaran disebabkan kegiatan baru akan dilaksanakan pada bulan September (setelah pelantikan anggota DPRD yang baru).

b. Publikasi dan Dokumentasi Dewan

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi biaya-biaya publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.369.073.200,- dan sampai dengan Juni 2024 terealisasi sebesar Rp.41.429.170,- atau 11,23 %.

c. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Sub Kegiatan ini berupa penyediaan staf tenaga ahli fraksi. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.244.750.000,- dan sampai dengan Juni 2024 terealisasi sebesar Rp.77.000.000,- atau 31,46 %.

5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

a. Kunjungan Kerja Dalam Daerah

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi biaya-biaya kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke dalam daerah untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan Pimpinan dan

Anggota DPRD. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.366.513.000,- sampai dengan Juni 2024 terealisasi sebesar Rp.2.587.636.800,- atau 48,22 %.

b. Pelaksanaan Reses

Sub Kegiatan ini berupa penyediaan biaya-biaya pelaksanaan reses sebanyak 3 kali masa siding bagi Anggota DPRD turun menemui masyarakat di daerah pemilihan masing-masing guna menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihan tersebut. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.790.689.550,- dan sampai dengan Juni 2024 terealisasi sebesar Rp.825.700.500,- atau sebesar 46,11 %.

6. Program Fasilitasi Tugas DPRD

a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Sub Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Luar Daerah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah, guna menghadiri rapat-rapat koordinasi atau pun untuk konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.540.668.000,- dan sampai dengan Juni 2024 terealisasi sebesar Rp.5.022.010.600,- atau 58,80 %.

Tabel 2.1

EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN BULAN JUNI TAHUN 2024 KOTA PAYAKUMBUH

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja tahun s.d Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran SKPD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 %		Permasalahan	SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 +12		14 = 13/5 *			15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA.			70.620.123.441		16.858.167.089		17.915.483.267		2.860.356.227		2.605.062.189		-		-		5.465.418.416		22.323.585.505		31,6		
1)		Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.			128.544.800		18.262.850		28.784.400		3.157.000		-		-		-		3.157.000		21.419.850		16,7		
1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		67.362.800		9.113.350	2 dokumen	12.324.050		2.827.000		-						2.827.000	2 Dokumen	11.940.350		17,7	Masih rendahnya volume rapat-rapat Sekretariat DPRD yang dilaksanakan.	
1.2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		61.182.000		9.149.500	4 dokumen	16.460.350	3 Dokumen	330.000	1 Dokumen	-	-				4 Dokumen	330.000	4 Dokumen	9.479.500		15,5	Masih rendahnya volume rapat-rapat Sekretariat DPRD yang dilaksanakan.	
2)		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.			12.397.421.112		2.510.869.813		2.910.007.639		670.026.142		366.887.970		-		-		1.036.914.112		3.547.783.925		28,6		
2,1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		10.883.267.192		2.304.140.813	24 Orang	2.687.895.639	24 orang	627.087.142	24 orang	335.327.970					24 Orang	962.415.112	24 orang	3.266.555.925		30,0		
2,2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1.514.153.920		206.729.000	4 Dokumen	222.112.000	1 Dokumen	42.939.000	1 Dokumen	31.560.000	-				2 Dokumen	74.499.000	2 Dokumen	281.228.000		18,6		
3)		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.			80.000.000		12.720.000		-		-		-		-		-		-		12.720.000		15,9		
3,1		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		80.000.000		12.720.000					-	-	-	-	-	-		-		12.720.000		15,9		

4)		Administrasi Umum Perangkat Daerah.			7.195.916.990		2.295.963.453		2.764.818.050		326.990.255		387.057.304		-		-		714.047.559		3.010.011.012		41,8		
4,1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		83.957.760		20.937.650	4 Paket	21.021.800	1 Paket	4.970.000	1 Paket	5.310.000					2 Paket	10.280.000	4 Paket	31.217.650		37,2		
4,2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		799.689.760		219.484.550	4 Paket	523.567.700	1 Paket	3.607.500	1 PAket	8.602.500					2 Paket	12.210.000	4 Paket	231.694.550		29,0		
4,3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		696.279.320		64.968.500	4 Paket	131.215.350	1 Paket	18.388.200	1 Paket	10.000.800					2 Paket	28.389.000	4 Paket	93.357.500		13,4		
4,4		Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		211.617.600		21.375.850	4 Paket	27.644.750	1 Paket	3.986.000		-					1 Paket	3.986.000	4 Paket	25.361.850		12,0		
4,5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		600.016.200		58.858.400	4 Dokumen	50.018.100	-	-		-						-	3 Dokumen	58.858.400		9,8		
4,6		Fasilitasi Kunjungan Tamu.	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1.304.995.350		218.737.586	12 Laporan	382.007.350	3 Laporan	40.102.050	3 Laporan	62.127.000					6 Laporan	102.229.050	4 Laporan	320.966.636		24,6		
4,7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		3.499.361.000		1.691.600.917	12 Laporan	1.629.343.000	3 Laporan	255.936.505	3 Laporan	301.017.004					6 Laporan	556.953.509	4 Laporan	2.248.554.426		64,3		
5)		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.204.000.000		377.726.500		5.753.800		-		-		-		-		-		377.726.500		31,4		

5.1		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		600.000.000		175.626.500			-	-		-						-		175.626.500		29,3		
5.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				60.000.000			-	-		-						-	2 unit	60.000.000				
5,3		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		4.000.000			1 Unit	5.653.800		-		-				-		-	-	-		-		
5,4		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		600.000.000		142.100.000	1 Unit	100.000		-		-						-	41 Unit	142.100.000		23,7		
6)		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.			3.883.553.344		947.851.184		980.720.460		163.483.705		145.421.789		-		-		308.905.494		1.256.756.678		32,4		
6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		39.200.000		3.888.000						-						-	1 laporan	3.888.000		9,9		
6,2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan		844.992.464		227.336.868	4 Laporan	230.521.488	1 Laporan	49.868.611	1 Laporan	31.026.695					2 laporan	80.895.306	4 laporan	308.232.174		36,5		
6,3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		2.999.360.880		716.626.316	4 Laporan	750.198.972	1 Laporan	113.615.094	1 Laporan	114.395.094					2 laporan	228.010.188	4 laporan	944.636.504		31,5		
7)		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.			3.268.357.625		1.377.559.375		853.535.728		87.642.971		100.326.222		-		-		187.969.193		1.565.528.568		47,9		

7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		852.800.000		140.366.350	4 Unit	217.600.000	4 Unit	33.990.471	4 Unit	48.846.978					4 unit	82.837.449	4 Unit	223.203.799		26,2		
7.2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1.312.120.000		232.210.240	17 Unit	402.340.000	17 Unit	39.598.500	17 Unit	27.082.930					17 unit	66.681.430	17 unit	298.891.670		22,8		
7.3		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		20.000.000		34.910.000				-		-						-	62 Unit	34.910.000		174,6		
7,4		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		119.338.080		73.472.000	20 Unit	83.718.000	1 Unit	8.036.000	5 Unit	13.205.000					6 unit	21.241.000	20 unit	94.713.000		79,4		
7,5		Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		964.099.545		896.600.785	2 unit	149.877.728		6.018.000	2 Unit	11.191.314					2 Unit	17.209.314	2 Unit	913.810.099		94,8		
8)		Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD.			41.482.830.720		9.165.990.914		9.990.734.890		1.606.389.154		1.586.163.404		-		-		3.192.552.558		12.358.543.472		29,8		
8.1		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD.	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD		40.562.034.800		8.966.590.914	25 Orang	9.339.484.890	25 Orang	1.606.389.154	25 Orang	1.403.723.404					25 orang	3.010.112.558	25 Orang	11.976.703.472		29,5		
8.2		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD.	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		795.795.920		196.900.000	2 Paket	620.000.000		-	1 Paket	182.440.000					1 paket	182.440.000	53 paket	379.340.000		47,7		
8,3		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		125.000.000		2.500.000	25 Orang	31.250.000		-		-						-	5 Orang	2.500.000		2,0		

9)		Kegiatan Layanan Administrasi DPRD.			979.498.850		151.223.000		381.128.300		2.667.000		19.205.500		-		-		21.872.500		173.095.500		17,7		
9,1		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD.	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD		56.574.250		23.615.700				-		-						-	2 Dokumen	23.615.700		41,7		
9,2		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD		822.924.600		105.635.000	4 Laporan	355.670.500	1 Laporan	2.667.000	1 Laporan	19.205.500					2 laporan	21.872.500	4 laporan	127.507.500		15,5		
9,3		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan		100.000.000		21.972.300	4 Paket	25.457.800				-						-	2 paket	21.972.300		22,0		
02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD.			30.250.126.055		12.212.680.964		17.585.499.400		4.959.150.550		3.629.198.795		-		-		8.588.349.345		20.801.030.309		68,8		
1)		Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.			371.943.140		37.603.250		88.999.650		6.187.250		-		-		-		6.187.250		43.790.500		11,8		
1.2		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		371.943.140		37.603.250	5 Dokumen	88.999.650		6.187.250		-						6.187.250	5 Dokumen	43.790.500		11,8	Masih rendahnya volume rapat-rapat pembahasan Ranperda	
2)		Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran.			1.931.160.340		325.799.850		426.245.700		3.780.000		21.656.625		-		-		25.436.625		351.236.475		18,2		
2.1		Pembahasan KUA dan PPAS.	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		125.576.530		29.953.600	1 dokumen	35.720.850		-		-						-	1 dokumen	29.953.600		23,9	Kegiatan belum dijadwalkan dalam Rapat Bamus.	
2.2		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		116.699.130		13.858.750	1 dokumen	16.698.950		-		-						-	1 dokumen	13.858.750		11,9	Kegiatan belum dijadwalkan dalam Rapat Bamus.	

2.3		Pembahasan APBD.	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		866.183.460		127.117.500	1 Dokumen	183.825.100		-		-					-	1 dokumen	127.117.500		14,7	Kegiatan belum dijadwalkan dalam Rapat Bamus.	
2.4		Pembahasan APBD Perubahan.	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		599.701.460		126.337.500	1 Dokumen	152.658.350		-		-					-	1 dokumen	126.337.500		21,1	Kegiatan belum dijadwalkan dalam Rapat Bamus.	
2.5		Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD.	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD		222.999.760		28.532.500	1 Dokumen	37.342.450		3.780.000		21.656.625					25.436.625	1 dokumen	53.969.125		24,2		
3)		Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.			264.999.760		35.354.900		141.964.550		1.841.400		1.107.000		-		-	2.948.400		38.303.300		14,5		
3.1		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintah dan Hukum.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		90.000.000		10.960.300	1 Dokumen	38.208.700		1.841.400		1.107.000					2.948.400	1 dokumen	13.908.700		15,5	Kegiatan belum dijadwalkan dalam Rapat Bamus.	
3.2		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastuktur.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		50.000.000		7.250.700	1 Dokumen	35.871.600				-					-	1 Dokumen	7.250.700		14,5	Kegiatan belum dijadwalkan dalam Rapat Bamus.	
3.3		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat.	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		74.999.760		12.114.900	1 Dokumen	36.218.100				-					-	1 Dokumen	12.114.900		16,2	Kegiatan belum dijadwalkan dalam Rapat Bamus.	
3.4		Pengawasaan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		50.000.000		5.029.000	1 Dokumen	31.666.150				-		-		-	-	1 Dokumen	5.029.000		10,1	Kegiatan belum dijadwalkan dalam Rapat Bamus.	
4)		Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD.			6.086.649.720		839.002.421		1.230.418.950		45.825.400		72.603.770		-		-	118.429.170		957.431.591		15,7		

4.1		Pendalaman Tugas DPRD.	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		4.097.524.760		237.077.006	2 Dokumen	616.595.750				-						-	4 dokumen	237.077.006		5,8		
4.2		Publikasi dan Dokumentasi Dewan.	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan		1.065.124.960		370.925.415	4 Dokumen	369.073.200	1 Dokumen	7.325.400	1 Dokumen	34.103.770					2 dokumen	41.429.170	4 dokumen	412.354.585		38,7		
4.3		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi.	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi Yang dibayarkan		924.000.000		231.000.000	7 Orang	244.750.000	7 Orang	38.500.000	7 Orang	38.500.000					7 orang	77.000.000	7 Orang	308.000.000		33,3		
5)		Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			13.246.938.461		5.395.832.563		7.157.202.550		2.182.632.800		1.230.704.500		-		-		3.413.337.300		8.809.169.863		66,5		
5.1		Kunjungan Kerja Dalam Daerah.	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		8.431.901.000		3.193.498.663	4 Laporan	5.366.513.000	1 Laporan	1.356.932.300	1 Laporan	1.230.704.500					2 laporan	2.587.636.800	4 laporan	5.781.135.463		68,6		
5.2		Pelaksanaan Reses.	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		4.815.037.461		2.202.333.900	2 Dokumen	1.790.689.550	1 Dokumen	825.700.500		-					1 dokumen	825.700.500	3 dokumen	3.028.034.400		62,9		
6)		Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD			8.348.434.634		5.579.087.980		8.540.668.000		2.718.883.700		2.303.126.900		-		-		5.022.010.600		10.601.098.580		127,0		
6.1		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		8.348.434.634		5.579.087.980	12 Dokumen	8.540.668.000	3 Dokumen	2.718.883.700	4 Dokumen	2.303.126.900					7 dokumen	5.022.010.600	4 dokumen	10.601.098.580		127,0		
																					-				
					100.870.249.496		29.070.848.053		35.500.982.667	-	7.819.506.777	-	6.234.260.984	-	-	-	-	-	14.053.767.761	-	14.053.767.761		13,9		
															Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program										
																Predikat Kinerja dari Seluruh Program									

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh "Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah." Maka untuk mengetahui kinerja Sekretariat DPRD dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebagai berikut:

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Satuan	Penjelasan			Keterangan/ kriteria
				Alasan	Formulasi/ cara pengukuran	Sumber data	
1.	Meningkatnya fasilitasi Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD.	IKM	Indeks	Sesuai dengan amanat UU No.25 tahun 2010 dan Permendagri No.86 tahun 2017 yang mengharuskan perencanaan secara bottom-up sebagai salah satu komponen perencanaan.	Skor Nilai IKM	Setwan	Hasil Pengolahan Kuosioner Survey Kepuasan Masyarakat.

Adapun nilai IKM Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh tahun 2023 yaitu 84,85 atau 101 % dari target yang ditetapkan yaitu 84.

Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh
Tahun 2023-2026

NO.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Derah				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18
1	Indeks kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD			Nilai IKM	Nilai	84	85	85	86	84.85				86	

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan mendukung tugas dan fungsi DPRD, dimana dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD

Beberapa permasalahan yang ada terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD
2. Masih terbatasnya SDM aparatur dalam memberikan pelayanan dan mendukung kegiatan-kegiatan pimpinan dan anggota DPRD

Tantangan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD
2. Penyiapan fasilitasi pendukung untuk pimpinan dan anggota terpilih pasca pemilu 2024

Berdasarkan uraian diatas dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Kurangnya jumlah sumber daya aparatur
2. Rendahnya kualitas sumber daya aparatur
3. Terbatasnya sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019 – 2024 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025.

Visi RPJMN 2019 – 2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia yang maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong".

Misi yang mendukung pencapaian visi RPJMN 2020 – 2024 antara lain:

Misi RPJMN 2020-2024

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Agenda Pembangunan Nasional:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Renja Sekretariat DPRD mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022. Adapun visi Sekretariat DPRD seperti yang tertuang dalam Renstra adalah "Terwujudnya pelayanan yang prima dan professional dalam memfasilitasi tugas-tugas DPRD Kota Payakumbuh".

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 yaitu "Meningkatkan Kualitas Dan Efektifitas Fasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD Kota Payakumbuh"

Sesuai dengan Tugas Pokok Sekretariat DPRD, maka tujuan Sekretariat DPRD yaitu : " Terwujudnya tata Kelola pemerintahan (Sekretariat DPRD) yang efektif, efisien dan akuntabel.

Tujuan tersebut dijabarkan melalui beberapa sasaran. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Sasaran yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh dalam rangka menjalankan misi untuk mewujudkan visi adalah: Meningkatkan fasilitasi Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas fungsi DPRD

3.3. Program dan Kegiatan

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
      a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
      b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
      a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
      b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
    a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
    c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
    d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
    e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
    f. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
    g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    a. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
    a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
    b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
    a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan.
    b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
    c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
    d. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD.
    a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD.
    b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD.
    c. Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD.
8. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD.
    a. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.
    b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

II. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD.

1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.

a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran.
   a. Pembahasan KUA dan PPAS.
   b. Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS.
   c. Pembahasan APBD.
   d. Pembahasan APBD Perubahan.
   e. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.
3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.
   a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum.
   b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Insfrastruktur Sub Kegiatan ini berupa rapat-rapat hearing dan turun lapangan dalam rangka pengawasan DPRD dalam urusan pemerintahan bidang insfrastruktur.
   c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
   d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian.
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD.
   a. Pendalaman Tugas DPRD.
   b. Publikasi dan Dokumentasi Dewan.
   c. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi.
5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat.
   a. Kunjungan Kerja Dalam Daerah.
   b. Pelaksanaan Reses.
6. Program Fasilitasi Tugas DPRD.
   a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

3.4. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD.

Sekretariat Dewan tahun 2024 mempunyai total belanja langsung Rp. 35.500.982.667,-. Ada 2 (dua) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan. Program dan kegiatan yang mengalami perubahan anggaran yaitu:

I. Program penunjang urusan pemerintahan daerah.

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Jumlah anggaran sebesar Rp. 12.324.050,- berubah menjadi Rp. 12.046.500,- atau berkurang sebesar Rp. 277.550,- sesuai kebutuhan.
2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Jumlah anggaran sebesar Rp. 16.460.350,- berubah menjadi Rp. 13.677.500,- atau berkurang sebesar Rp. 2.782.850,- sesuai kebutuhan.

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Jumlah anggaran sebesar Rp. 2.687.895.639,- berubah menjadi Rp. 2.690.882.171 atau bertambah sebesar Rp. 2.986.532,- sesuai kebutuhan.
2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Jumlah anggaran sebesar Rp. 222.112.000,- berubah menjadi Rp. 240.642.000,- atau bertambah sebesar Rp. 18.530.000,- sesuai kebutuhan.

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Jumlah anggaran sebesar Rp. 21.021.800,- berubah menjadi Rp. 21.009.550,- atau berkurang sebesar Rp. 12.250,- sesuai kebutuhan.
2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Jumlah anggaran sebesar Rp. 523.567.700,- berubah menjadi Rp. 337.927.500,- atau berkurang sebesar Rp. 185.640.200,-. Adanya pemindahan anggaran pembelian pin emas anggota DPRD bar uke sub kegiatan penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD.
3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Jumlah anggaran sebesar Rp. 131.215.350,- berubah menjadi Rp. 153.713.750,- atau bertambah sebesar Rp. 22.498.500,- sesuai kebutuhan.
4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Jumlah anggaran sebesar Rp. 1.629.343.000,- berubah menjadi Rp. 1.689.026.000,- atau bertambah sebesar Rp. 59.683.000,- sesuai kebutuhan.

d) Kegiatan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Jumlah anggaran sebesar Rp. 5.653.800,- berubah menjadi Rp. 0,-

atau berkurang sebesar Rp. 5.653.800,-. Anggaran ini dihilangkan karena masih berupa cantolan.

2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Jumlah anggaran sebesar Rp. 100.000,- berubah menjadi Rp. 0,- atau berkurang sebesar Rp. 100.000,-. Anggaran ini dihilangkan karena masih berupa cantolan.

e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Jumlah anggaran sebesar Rp. 230.521.488,- berubah menjadi Rp. 235.586.088,- atau bertambah sebesar Rp. 5.064.600,- sesuai kebutuhan.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Jumlah anggaran sebesar Rp. 750.198.972,- berubah menjadi Rp. 753.546.990,- atau bertambah sebesar Rp. 3.348.018,- sesuai kebutuhan.

f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Jumlah anggaran sebesar Rp. 402.340.000,- berubah menjadi Rp. 386.400.000,- atau berkurang sebesar Rp. 15.400.000,- sesuai kebutuhan.

g) Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

1) Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD. Jumlah anggaran sebesar Rp. 620.000.000,- berubah menjadi Rp. 870.000.000,- atau bertambah sebesar Rp. 250.000.000,-kebutuhan. Adanya pemindahan dana pembelian pin emas untuk anggota DPRD baru, Dimana sebelumnya dana terletak pada sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

h) Kegiatan Layanan Administrasi DPRD

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD. Jumlah anggaran sebesar Rp. 355.670.500,- berubah menjadi Rp. 285.821.500,- atau berkurang sebesar Rp. 69.849.000,- sesuai kebutuhan.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD. Jumlah anggaran sebesar Rp. 25.457.500,- berubah menjadi Rp. 25.455.750,- atau berkurang sebesar Rp. 2.050,- sesuai kebutuhan.

II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

a) Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran

1) Sub Kegiatan Pembahasan APBD. Jumlah anggaran sebesar Rp. 183.825.100,- berubah menjadi Rp. 195.183.350,- atau bertambah sebesar Rp. 11.358.250,-. Adanya penambahan makan minum rapat Banggar yang dilaksanakan di kantor.
2) Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan. Jumlah anggaran sebesar Rp. 152.658.350,- berubah menjadi Rp. 145.855.950,- atau berkurang sebesar Rp. 6.802.400,- sesuai kebutuhan.
3) Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD. Jumlah anggaran sebesar Rp. 37.342.450,- berubah menjadi Rp. 30.269.950,- atau berkurang sebesar Rp. 7.072.500,- sesuai kebutuhan.

b) Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

1) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum. Jumlah anggaran sebesar Rp. 38.208.700,- berubah menjadi Rp. 38.753.700,- atau bertambah sebesar Rp. 545.000,- sesuai kebutuhan rapat-rapat DPRD yang dilaksanakan.
2) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastuktur. Jumlah anggaran sebesar Rp. 35.871.600,- berubah menjadi Rp. 25.221.600,- atau berkurang sebesar Rp. 10.650.000,- sesuai kebutuhan rapat-rapat DPRD.
3) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat. Jumlah anggaran sebesar Rp. 36.218.100,- berubah menjadi Rp. 24.993.100,- atau berkurang sebesar Rp. 11.225.000,- sesuai kebutuhan rapat-rapat DPRD.
4) Sub Kegiatan Pengawasaan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian. Jumlah anggaran sebesar Rp. 31.666.150,- berubah menjadi Rp. 25.153.650,- atau berkurang sebesar Rp. 6.512.500,- sesuai kebutuhan rapat-rapat DPRD.

c) Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD

1) Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD. Jumlah anggaran sebesar Rp. 616.595.750,- berubah menjadi Rp. 541.460.750,- atau berkurang sebesar Rp. 75.135.000,- sesuai kebutuhan.
2) Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan. Jumlah anggaran sebesar Rp. 369.073.200,- berubah menjadi Rp. 342.439.400,- atau bertambah sebesar Rp. 26.366.800,- sesuai kebutuhan.

d) Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

1) Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah. Jumlah anggaran sebesar Rp. 5.366.513.000,- berubah menjadi Rp. 5.889.532.000,- atau bertambah sebesar Rp. 523.019.000,- karena kurangnya anggaran untuk kegiatan kunjungan kerja anggota DPRD.

e) Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD. Jumlah anggaran sebesar Rp. 8.540.668.000,- berubah menjadi Rp. 9.567.381.000,- atau bertambah sebesar Rp. 1.026.713.000,- karena kurangnya anggaran untuk kegiatan konsultasi anggota DPRD.

Tabel 3.1.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SEKRETARIAT DPRD							**20.369.152.160**	**35.500.982.667**	**35.500.982.667**	**15.131.830.507**							**22.406.177.211**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG**							**20.369.152.160**	**35.500.982.667**	**35.500.982.667**	**15.131.830.507**							**22.406.177.211**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**20.369.152.160**	**35.500.982.667**	**35.500.982.667**	**15.131.830.507**							**22.406.177.211**	
1,	**36.983**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**	**Nilai IKM Sekretariat DPRD Nilai AKIP Sekretariat DPRD**				**84 A Indeks Kategori**	**84 A Indeks Kategori**	**16.652.971.110**	**17.915.483.267**	**17.997.876.217**	**1.665.406.946**							**18.318.378.056**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase capaian kinerja program/kegiatan Persentase konsisten program kegiatan renstra dengan renja*				1	1	28.784.550	28.784.400	25.724.000	-3.060.550			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	PD dan stakeholder		31.663.005	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	12.324.050	12.324.050	12.046.500	-277.550	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			13.556.455	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	16.460.500	16.460.350	13.677.500	-2.783.000	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			18.106.550	SEKRETARIAT DPRD

	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan*				1	1	2.790.245.332	2.910.007.639	2.931.524.171	141.278.839			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	PD dan stakeholder		3.069.269.700	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2.568.133.332	2.687.895.639	2.690.882.171	122.748.839	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			2.824.946.500	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	222.112.000	222.112.000	240.642.000	18.530.000	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			244.323.200	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan umum Sekretariat Dewan yang sesuai standar*				1	1	1.663.685.620	2.764.818.050	2.661.347.100	997.661.480			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	PD dan stakeholder		1.830.164.182	SEKRETARIAT DPRD

	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	21.021.800	21.021.800	21.009.550	-12.250	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			23.123.980	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	523.570.500	523.567.700	337.927.500	-185.643.000	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			575.927.550	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	131.216.240	131.215.350	153.713.850	22.497.610	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			144.447.864	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	27.645.380	27.644.750	27.644.750	-630	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			30.409.918	SEKRETARIAT DPRD

	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	50.022.240	50.018.100	50.018.100	-4.140	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			55.024.464	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	382.009.460	382.007.350	382.007.350	-2.110	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			420.210.406	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	528.200.000	1.629.343.000	1.689.026.000	1.160.826.000	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			581.020.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor*				1	1	5.754.000	5.753.800	0	-5.754.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	PD dan stakeholder		6.329.400	SEKRETARIAT DPRD

	4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.654.000	5.653.800	0	-5.654.000	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			6.219.400	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	100.000	100.000	0	-100.000	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			110.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan*				1	1	980.752.248	980.720.460	989.133.078	8.380.830			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	PD dan stakeholder		1.078.827.473	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	230.521.488	230.521.488	235.586.088	5.064.600	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			253.573.637	SEKRETARIAT DPRD

	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	750.230.760	750.198.972	753.546.990	3.316.230	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			825.253.836	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik*				1	1	811.885.180	853.535.728	838.135.728	26.250.548			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	PD dan stakeholder		893.073.698	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	175.700.000	217.600.000	217.600.000	41.900.000	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			193.270.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	17 Unit	402.390.000	402.340.000	386.940.000	-15.450.000	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			442.629.000	SEKRETARIAT DPRD

	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	83.795.180	83.718.000	83.718.000	-77.180	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			92.174.698	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	150.000.000	149.877.728	149.877.728	-122.272	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			165.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Persentase terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD*				1	1	9.990.734.890	9.990.734.890	10.240.734.890	250.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	PD dan stakeholder		10.989.808.379	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																	
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	9.339.484.890	9.339.484.890	9.339.484.890	0	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			10.273.433.379	SEKRETARIAT DPRD

	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	620.000.000	620.000.000	870.000.000	250.000.000	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			682.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				25 Orang	25 Orang	31.250.000	31.250.000	31.250.000	0	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			34.375.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Persentase terlaksananya layanan administrasi DPRD*				1	1	381.129.290	381.128.300	311.277.250	-69.852.040			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	PD dan stakeholder		419.242.219	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	355.671.290	355.670.500	285.821.500	-69.849.790	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			391.238.419	SEKRETARIAT DPRD

	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.458.000	25.457.800	25.455.750	-2.250	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			28.003.800	SEKRETARIAT DPRD
2,	**37.348**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN**	**persentase ranperda yang ditetapkan**				**1**	**1**	**3.716.181.050**	**17.585.499.400**	**17.503.106.450**	**371.618.105**							**4.087.799.155**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Persentase terlaksananya pembentukan Perda dan Peraturan DPRD*				1	1	88.999.850	88.999.650	88.999.650	-200			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	PD dan stakeholder		97.899.835	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	88.999.850	88.999.650	88.999.650	-200	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			97.899.835	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Persentase terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran*				1	100% %	289.762.080	426.245.700	423.729.050	133.966.970			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	PD dan stakeholder		318.738.288	SEKRETARIAT DPRD

	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	35.720.980	35.720.850	35.720.850	-130	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			39.293.078	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	16.698.950	16.698.950	16.698.950	0	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			18.368.845	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	99.999.800	183.825.100	195.183.350	95.183.550	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			109.999.780	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	99.999.900	152.658.350	145.855.950	45.856.050	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			109.999.890	SEKRETARIAT DPRD

	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	37.342.450	37.342.450	30.269.950	-7.072.500	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			41.076.695	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Persentase terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan*				1	1	107.062.810	141.964.550	114.122.050	7.059.240			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	PD dan stakeholder		117.769.091	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				1 Laporan	1 Laporan	27.826.950	38.208.700	38.753.700	10.926.750	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			30.609.645	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	25.346.700	35.871.600	25.221.600	-125.100	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			27.881.370	SEKRETARIAT DPRD

	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																	
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				1 Laporan	1 Laporan	27.188.410	36.218.100	24.993.100	-2.195.310	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			29.907.251	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	26.700.750	31.666.150	25.153.650	-1.547.100	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			29.370.825	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas DPRD*				1	1	1.230.419.500	1.230.418.950	1.128.650.150	-101.769.350			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	PD dan stakeholder		1.353.461.450	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				4 Dokumen	4 Dokumen	616.596.000	616.595.750	541.460.750	-75.135.250	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			678.255.600	SEKRETARIAT DPRD

	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																	
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	7 Orang	244.750.000	244.750.000	244.750.000	0	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			269.225.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																	
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				4 Dokumen	4 Dokumen	369.073.500	369.073.200	342.439.400	-26.634.100	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			405.980.850	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Persentase terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat*				1	1	1.499.936.810	7.157.202.550	7.157.143.550	5.657.206.740			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	PD dan stakeholder		1.649.930.491	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																	
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				4 Laporan	4 Laporan	499.937.000	5.366.513.000	5.366.454.000	4.866.517.000	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			549.930.700	SEKRETARIAT DPRD

	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																	
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				2 Dokumen	2 Dokumen	999.999.810	1.790.689.550	1.790.689.550	790.689.740	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.099.999.791	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Persentase terlaksananya fasilitasi tugas DPRD*				1	1	500.000.000	8.540.668.000	8.590.462.000	8.090.462.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	PD dan stakeholder		550.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	500.000.000	8.540.668.000	8.590.462.000	8.090.462.000	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3.Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			550.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	JUMLAH								**20.369.152.160**	**35.500.982.667**	**35.500.982.667**	**15.131.830.507**							**22.406.177.211**	

BAB V
P E N U T U P

Dalam perubahan Rencana Kerja Sekretriat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2024 ada beberapa kegiatan yang dirobah atau pun digeser, dimana perobahan/pergeseran tersebut telah sesuai dengan analisa masing-masing PPTK yang didasarkan kepada hasil pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di tahun berjalan.

Dengan dilakukannya perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 diharapkan kedepannya perencanaan setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Visi Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh yaitu terwujudnya pelayanan yang prima dan profesional dalam memfasilitasi tugas-tugas DPRD.

Demikianlah Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2024 ini dibuat untuk dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan kinerja kedepannya.

Payakumbuh, Juni 2024
SEKRETARIS DPRD KOTA PAYAKUMBUH

YONREFLI, S.Sos, MAP
NIP. 196911081991031004

LAMPIRAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024 SESUAI SUMBER PENDANAAN

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Awal 2024 (Rp)	Pagu Setelah Perubahan 2024 (Rp)	Sumber Pendanaan (Rp)									Ket
										DAU Bebas	DAK Fisik	DAK Non Fisik	DAU DIARAHKAN					BLUD	Insentif Fisikal	
													Bidang Pendidikan	Bidang Kesehatan	Bidang PUPR	Bidang Kewilayahan	P3K			
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	02						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													SETWAN
							SEKRETARIAT DPRD													
4	02	01	2				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**17.915.483.267**	**17.997.876.217**	**17.997.876.217**									**14**	
4	02	01	2	01			Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.784.400	25.724.000	25.724.000									-	
4	02	01	2	01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.324.050	12.046.500	12.046.500										
4	02	01	2	01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.460.350	13.677.500	13.677.500										
4	02	01	2	02			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.910.007.639	2.931.524.171	2.931.524.171									-	
4	02	01	2	02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.687.895.639	2.690.882.171	2.690.882.171										
4	02	01	2	02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	222.112.000	240.642.000	240.642.000										
4	02	01	2	05			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	-	-	-										
4	02	01	2	05	02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
4	02	01	2	06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.764.818.050	2.661.347.100	2.661.347.100									14	
4	02	01	2	06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.021.800	21.009.550	21.009.550										
4	02	01	2	06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	523.567.700	337.927.500	337.927.500										
4	02	01	2	06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	131.215.350	153.713.850	153.713.850										

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Awal 2023 (Rp)	Pagu Setelah Perubahan 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan (Rp)									Ket
										DAU Bebas	DAK Fisik	DAK Non Fisik	DAU DIARAHKAN					BLUD	Insentif Fisikal	
													Bidang Pendidikan	Bidang Kesehatan	Bidang PUPR	Bidang Kewilayahan	P3K			
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	02	01	2	06	05		Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	27.644.750	27.644.750	27.644.750										
4	02	01	2	06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.018.100	50.018.100	50.018.100										
4	02	01	2	06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	382.007.350	382.007.350	382.007.350										
4	02	01	2	06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.629.343.000	1.689.026.000	1.689.026.000										
4	02	01	2	07			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.753.800	-	-										
4	02	01	2	07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
4	02	01	2	07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
4	02	01	2	07	09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.653.800	-	-										
4	02	01	2	07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000	-	-										
4	02	01	2	08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	980.720.460	989.133.078	989.133.078									-	
4	02	01	2	08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
4	02	01	2	08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230.521.488	235.586.088	235.586.088										
4	02	01	2	08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	750.198.972	753.546.990	753.546.990										
4	02	01	2	09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	853.535.728	838.135.728	838.135.728										
4	02	01	2	09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	217.600.000	217.600.000	217.600.000										

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Awal 2023 (Rp)	Pagu Setelah Perubahan 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan (Rp)										Ket
										DAU Bebas	DAK Fisik	DAK Non Fisik	DAU DIARAHKAN					BLUD	Insentif Fisikal	
													Bidang Pendidikan	Bidang Kesehatan	Bidang PUPR	Bidang Kewilayahan	P3K			
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	02	01	2	09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	402.340.000	386.940.000	386.940.000										
4	02	01	2	09	05		Pemeliharaan Mebel													
4	02	01	2	09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.718.000	83.718.000	83.718.000										
4	02	01	2	09	10		Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	149.877.728	149.877.728	149.877.728										
4	02	01	2	15			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	9.990.734.890	10.240.734.890	10.240.734.890									-	
4	02	01	2	15	01		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	9.339.484.890	9.339.484.890	9.339.484.890										
4	02	01	2	15	02		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	620.000.000	870.000.000	870.000.000										
4	02	01	2	15	03		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	31.250.000	31.250.000	31.250.000										
4	02	01	2	16			Layanan Administrasi DPRD	381.128.300	311.277.250	311.277.250									-	
4	02	01	2	16	01		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD													
4	02	01	2	16	03		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	355.670.500	285.821.500	285.821.500										
4	02	01	2	16	14		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	25.457.800	25.455.750	25.455.750										
4	02	02					**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	17.585.499.400	19.003.103.450	19.003.103.450									14	
4	02	02	2	01	01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**88.999.650**	**88.999.650**	**88.999.650**									-	
4	02	02	2	01	01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	88.999.650	88.999.650	88.999.650										
4	02	02	2	01	02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	426.245.700	423.729.050	423.729.050									14	
4	02	02	2	01	02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	35.720.850	35.720.850	35.720.850										

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Awal 2023 (Rp)	Pagu Setelah Perubahan 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan (Rp)									Ket
										DAU Bebas	DAK Fisik	DAK Non Fisik	DAU DIARAHKAN					BLUD	Insentif Fisikal	
													Bidang Pendidikan	Bidang Kesehatan	Bidang PUPR	Bidang Kewilayahan	P3K			
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	02	02	2	01	02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	16.698.950	16.698.950	16.698.950										
4	02	02	2	01	02	03	Pembahasan APBD	183.825.100	195.183.350	195.183.350										
4	02	02	2	01	02	04	Pembahasan APBD Perubahan	152.658.350	145.855.950	145.855.950										
4	02	02	2	01	02	06	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	37.342.450	30.269.950	30.269.950										
4	02	02	2	01	03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	141.964.550	114.122.050	114.122.050									-	
4	02	02	2	01	03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	38.208.700	38.753.700	38.753.700										
4	02	02	2	01	03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastuktur	35.871.600	25.221.600	25.221.600										
4	02	02	2	01	03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	36.218.100	24.993.100	24.993.100										
4	02	02	2	01	03	04	Pengawasaan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	31.666.150	25.153.650	25.153.650										
4	02	02	2	01	04		Peningkatan Kapasitas DPRD	1.230.418.950	1.128.650.150	1.128.650.150									-	
4	02	02	2	01		02	Pendalaman Tugas DPRD	616.595.750	541.460.750	541.460.750										
4	02	02	2	01		03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	369.073.200	342.439.400	342.439.400										
4	02	02	2	01		05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	244.750.000	244.750.000	244.750.000										
4	02	02	2	01	05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	7.157.202.550	7.680.221.550	7.680.221.550									-	
4	02	02	2	01	05	01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	5.366.513.000	5.889.532.000	5.889.532.000										
4	02	02	2	01	05	03	Pelaksanaan Reses	1.790.689.550	1.790.689.550	1.790.689.550										
4	02	02	2	01	08		Fasilitasi Tugas DPRD	8.540.668.000	9.567.381.000	9.567.381.000									-	
4	02	02	2	01	08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8.540.668.000	9.567.381.000	9.567.381.000										
								35.500.982.667	**37.000.979.667**	**37.000.979.667**		-	-	-	-	-		-		